

BAB VI

PENUTUP

6.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai upaya Indonesia mewujudkan keberlanjutan dan peningkatan produksi pangan berdasarkan AIFS *Framework* periode 2021-2025 dapat disimpulkan bahwa keamanan pangan tidak lagi dapat dipahami sebagai persoalan domestik semata, namun telah bertransformasi menjadi isu strategis dalam kajian Hubungan Internasional yang membutuhkan kerja sama regional dan internasional. Kelahiran AIFS *Framework* merupakan bentuk respon ASEAN terhadap berbagai permasalahan pangan kawasan, mulai dari krisis pangan global 2007-2008, perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, hingga gangguan rantai pasok global. Dalam kerangka tersebut, ASEAN memposisikan tujuan “*to sustain and increase food production*” sebagai prioritas utama untuk menjaga keberlanjutan produksi sistem pangan kawasan. Bagi Indonesia, keterlibatan dalam AIFS bukan hanya bentuk partisipasi dalam rezim regional ASEAN, namun juga menjadi instrumen strategis guna memperkuat keamanan pangan nasional melalui penguatan aspek *availability* dan *stability* sebagai pondasi utama *food security*. Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi AIFS di Indonesia menunjukkan keterhubungan yang erat antara kebijakan domestik dan mekanisme regional dalam menciptakan sistem pangan yang lebih tangguh, adaptif, dan berkelanjutan.

Dalam perspektif teori rezim internasional, AIFS *Framework* dapat dipahami sebagai rezim kawasan yang memungkinkan negara-negara ASEAN mengkoordinasikan kepentingan mereka melalui seperangkat norma, aturan, dan mekanisme kerja sama yang disepakati bersama. Penelitian ini memperlihatkan bahwa pendekatan *interest-based* menjadi perspektif yang paling relevan dalam menjelaskan implementasi AIFS, karena seluruh negara anggota, termasuk Indonesia terlibat bukan karena dominasi kekuatan tertentu, namun karena adanya kepentingan bersama untuk menjaga keamanan pangan kawasan. AIFS berfungsi sebagai wadah yang mengurangi

ketidakpastian, memperkuat pertukaran informasi, serta mendorong kerja sama dalam penguatan produksi dan stabilisasi pangan. Dalam konteks tersebut, Indonesia tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat dari kerja sama regional, namun juga sebagai aktor yang aktif menjembatani kepentingan nasional dengan tujuan bersama ASEAN. Hal tersebut memperlihatkan bahwa keamanan pangan telah menjadi bagian dari diplomasi non-tradisional Indonesia yang semakin penting dalam menghadapi tantangan global yang kompleks dan saling berkaitan

Temuan penelitian ini juga memperlihatkan bahwa dalam teori *food security*, keamanan pangan merupakan isu keamanan non-tradisional yang semakin relevan dalam hubungan internasional kontemporer. Meskipun tidak terdapat ancaman militer atau konflik bersenjata yang secara langsung mengancam Indonesia selama periode penelitian, berbagai tantangan seperti perubahan iklim, gangguan rantai pasok global, pandemi, fluktuasi harga pangan, serta ketidakpastian kondisi ekonomi internasional tetap berpotensi memengaruhi ketersediaan dan stabilitas pangan nasional. Dalam konteks tersebut, keamanan tidak lagi hanya dipahami sebagai upaya melindungi negara dari ancaman fisik, tetapi juga sebagai kemampuan negara dalam menjamin keberlangsungan kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu, penguatan aspek *availability* dan *stability* yang dilakukan Indonesia melalui implementasi AIFS *Framework* menunjukkan bahwa pangan telah menjadi sektor strategis yang memerlukan perhatian dan kerja sama lintas negara.

Dalam konteks analisis terhadap aspek *availability*, penelitian ini menemukan bahwa Indonesia mengimplementasikan objektif pertama AIFS melalui berbagai kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas produksi pangan secara berkelanjutan. Strategi tersebut dicapai melalui kombinasi intensifikasi, ekstensifikasi, dan serap panen yang saling melengkapi satu sama lain. Intensifikasi dilakukan melalui penyediaan benih unggul, pupuk bersubsidi, rehabilitasi irigasi, optimalisasi lahan, hingga penerapan teknologi pertanian yang bertujuan mendorong produktivitas tanpa harus memperluas lahan secara signifikan. Di sisi lain, ekstensifikasi dicapai melalui program cetak sawah baru, pemanfaatan lahan potensial dan marginal, dan peningkatan

indeks pertanaman guna memperluas basis produksi pangan nasional. Sementara itu, kebijakan serap panen yang dijalankan oleh Perum BULOG berfungsi memastikan hasil produksi petani terserap secara optimal sehingga dapat memperkuat cadangan beras pemerintah sekaligus menjaga stabilitas harga di tingkat petani. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa peningkatan *availability* tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi semata, namun juga pada kemampuan negara mengelola hasil produksi dan stok pangan secara efektif.

Lebih lanjut, penelitian ini memperlihatkan bahwa mekanisasi pertanian menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan *availability* yang berkelanjutan. Penggunaan alat dan mesin pertanian seperti pompa air, generator, kompresor, serta teknologi pertanian presisi terbukti mampu meningkatkan efisiensi usaha tani, mempercepat proses produksi, mengurangi kehilangan hasil panen, dan mendorong produktivitas lahan. Berbagai studi kasus yang dibahas dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan mekanisasi mampu menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan metode konvensional. Di samping itu, integrasi teknologi pertanian modern dengan prinsip pertanian berkelanjutan juga menunjukkan bahwa peningkatan produksi tidak harus dicapai melalui eksploitasi sumber daya secara berlebihan. Mekanisasi pertanian pun tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan produksi pangan nasional, namun juga memperkuat daya tahan sektor pertanian Indonesia dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan keterbatasan tenaga kerja pertanian di masa depan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa diversifikasi pangan merupakan salah satu bagian penting dari strategi *availability* Indonesia dalam kerangka AIFS *Framework*. Diversifikasi tidak hanya diartikan sebagai upaya meminimalisir ketergantungan terhadap beras, namun juga sebagai strategi memperluas sumber pangan nasional berbasis potensi lokal. Pengembangan komoditas seperti jagung, singkong, ubi, talas, dan sagu memperlihatkan bahwa Indonesia mempunyai sumber daya pangan yang beragam dan dapat menjadi alternatif dalam menghadapi ketidakpastian pasokan global. Selain mendorong ketersediaan pangan, diversifikasi

juga berkontribusi pada peningkatan kualitas konsumsi masyarakat melalui program beras fortifikasi dan penguatan pola konsumsi Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA). Temuan ini menunjukkan bahwa keberlanjutan produksi pangan tidak hanya berkaitan dengan kuantitas produksi, namun juga kualitas pangan dan kemampuan sistem pangan nasional dalam menyediakan pilihan pangan yang lebih beragam bagi masyarakat.

Pada aspek *stability*, penelitian ini menemukan bahwa Indonesia mengimplementasikan AIFS melalui kombinasi kebijakan domestik dan keterlibatan aktif dalam berbagai mekanisme regional ASEAN+3. Stabilitas pangan diartikan sebagai kemampuan sistem pangan untuk menjaga ketersediaan dan pasokan pangan secara konsisten dalam menghadapi berbagai gangguan seperti perubahan iklim, bencana alam, krisis ekonomi, hingga gejolak geopolitik. Dalam konteks regional, Indonesia memainkan peran aktif dalam AMAF+3 sebagai forum koordinasi strategis yang mempertemukan negara-negara ASEAN, Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan untuk membahas berbagai tantangan keamanan pangan kawasan. Melalui forum tersebut, negara anggota melakukan evaluasi terhadap kondisi pangan kawasan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberadaan AMAF+3 memperkuat kapasitas ASEAN dalam merespon tantangan pangan secara bersama dan terkoordinasi.

Implementasi *stability* juga diperkuat melalui partisipasi Indonesia dalam APTERR yang berfungsi sebagai mekanisme cadangan beras darurat kawasan. Keberadaan APTERR memungkinkan negara-negara anggota mendapatkan bantuan beras secara cepat ketika menghadapi bencana, krisis kemanusiaan, maupun gangguan pasokan pangan yang signifikan. Selain itu, stabilitas pangan kawasan semakin diperkuat melalui AFSIS yang menyediakan data produksi, stok, perdagangan, harga pangan, serta sistem peringatan dini terhadap potensi krisis pangan. Melalui kedua mekanisme tersebut, ASEAN tidak hanya mempunyai kapasitas responsif terhadap krisis, namun juga kemampuan antisipatif dalam mengidentifikasi risiko sejak awal. Penelitian ini memperlihatkan bahwa keterlibatan aktif Indonesia dalam APTERR dan

AFSIS merupakan bentuk diplomasi pangan yang memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu aktor penting dalam menjaga stabilitas pangan regional.

Temuan penting lainnya adalah keberhasilan Indonesia dalam menginternalisasikan berbagai mekanisme regional ke dalam kebijakan nasional melalui penguatan FSVA dan SKPG. Kedua instrumen tersebut menjadi bukti bahwa implementasi AIFS tidak berhenti pada tingkat regional, namun diterjemahkan ke dalam sistem nasional yang mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. FSVA berperan dalam memetakan wilayah rentan pangan secara spasial, sementara SKPG berfungsi sebagai sistem peringatan dini untuk mendeteksi potensi kerawanan pangan dan gizi. Melalui pemanfaatan kedua instrumen tersebut, pemerintah Indonesia dapat menyusun intervensi yang lebih tepat sasaran, baik dalam bentuk peningkatan produksi, penguatan distribusi, maupun stabilisasi harga pangan. Maka dari itu, FSVA dan SKPG menjadi jembatan yang menghubungkan komitmen regional ASEAN dengan implementasi kebijakan nasional yang lebih adaptif dan responsif terhadap kondisi lapangan.

Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi AIFS *Framework* di Indonesia tidak hanya selaras dengan objektif *to sustain and increase food production*, namun dalam beberapa aspek juga mencerminkan capaian yang melampaui ekspektasi implementasi kerangka tersebut. Meskipun selama periode 2021–2025 Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti perubahan iklim, fenomena El Nino dan La Nina, gangguan rantai pasok global, fluktuasi harga pangan, hingga ketidakpastian ekonomi internasional, berbagai kebijakan nasional yang terintegrasi dengan mekanisme regional mampu menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan secara relatif baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya berhasil mengadopsi prinsip-prinsip AIFS ke dalam kebijakan domestik, tetapi juga mampu membangun kapasitas nasional yang semakin tangguh dalam menghadapi berbagai risiko pangan. Keberhasilan tersebut turut tervalidasi melalui partisipasi aktif Indonesia dalam forum AMAF+3, khususnya pada mekanisme APTERR, di mana selama periode penelitian Indonesia tidak pernah mengajukan permintaan bantuan

beras darurat. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa cadangan beras pemerintah, kapasitas produksi nasional, serta sistem stabilisasi pangan Indonesia dinilai mampu memenuhi kebutuhan domestik tanpa bergantung pada mekanisme bantuan darurat kawasan. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya berperan sebagai peserta yang mengimplementasikan komitmen AIFS *Framework*, namun juga menunjukkan kapasitas sebagai negara yang memiliki ketahanan pangan beras yang relatif kuat serta mampu berkontribusi dalam memperkuat keamanan pangan di tingkat regional ASEAN+3.

6.2 SARAN

6.2.1 Saran Praktis

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi *ASEAN Integrated Food Security (AIFS) Framework 2021–2025* dalam mewujudkan keberlanjutan dan peningkatan produksi pangan di Indonesia, penulis mengapresiasi berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah Indonesia bersama ASEAN dalam memperkuat keamanan pangan melalui aspek *availability* dan *stability*. Penguatan produksi melalui intensifikasi, ekstensifikasi, mekanisasi pertanian, diversifikasi pangan, serta penguatan cadangan pangan menunjukkan komitmen Indonesia dalam mendukung tujuan utama AIFS untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan kawasan. Di tingkat regional, keterlibatan aktif Indonesia dalam forum AMAF+3, mekanisme APTERR, serta sistem informasi pangan AFSIS juga memperlihatkan pentingnya kerja sama kawasan dalam menghadapi ancaman perubahan iklim, gejolak harga pangan, gangguan rantai pasok global, maupun ketidakpastian geopolitik.

Walaupun demikian, penelitian ini menemukan bahwa masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu menjadi perhatian. Ketimpangan kerawanan pangan antarwilayah, khususnya antara Indonesia bagian barat dan timur, menunjukkan bahwa pembangunan sistem pangan nasional belum sepenuhnya merata. Selain itu, ancaman perubahan iklim yang semakin meningkat berpotensi mempengaruhi produktivitas

pertanian dan stabilitas distribusi pangan di berbagai daerah. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar pemerintah Indonesia terus memperkuat implementasi Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) dan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) sebagai dasar penyusunan kebijakan yang lebih terarah, responsif, dan berbasis data. Penguatan infrastruktur pertanian, distribusi pangan, irigasi, serta akses teknologi pertanian modern juga perlu diprioritaskan terutama pada wilayah yang masih memiliki tingkat kerentanan pangan tinggi.

Di tingkat regional, penulis menyarankan agar Indonesia selalu mendorong optimalisasi kerja sama dalam forum AMAF+3, APTERR, dan AFSIS melalui peningkatan pertukaran data pangan, penguatan sistem peringatan dini, serta penyempurnaan mekanisme respons krisis pangan kawasan. Mengingat tantangan keamanan pangan di masa depan semakin kompleks, ASEAN perlu memperkuat komitmen bersama dalam menjaga cadangan pangan regional dan meningkatkan koordinasi antarnegara anggota sehingga respon terhadap krisis dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif. Dengan demikian, tujuan AIFS *Framework* untuk menciptakan sistem pangan ASEAN yang berkelanjutan, tangguh, dan adaptif dapat tercapai secara optimal.

6.2.2 Saran Teoritis

Secara teoritis, penggunaan teori rezim internasional dan teori *food security* dalam penelitian ini terbukti mampu menjelaskan bagaimana kerja sama regional ASEAN melalui AIFS *Framework* dapat mempengaruhi implementasi kebijakan pangan nasional Indonesia. Teori rezim internasional membantu menjelaskan peran norma, aturan, dan mekanisme kerja sama kawasan dalam membentuk perilaku negara anggota, sedangkan teori *food security* memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk memahami keterkaitan antara aspek *availability* dan *stability* dalam mewujudkan keamanan pangan yang berkelanjutan.

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian Hubungan Internasional, khususnya pada studi keamanan non-tradisional, diplomasi pangan, dan kerja sama regional ASEAN. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji implementasi AIFS Framework maupun keamanan pangan di Asia Tenggara dengan pendekatan yang lebih luas. Mengingat penelitian ini hanya berfokus pada dua dimensi *food security*, yaitu *availability* dan *stability*, penelitian mendatang dapat mengembangkan analisis dengan memasukkan dimensi *accessibility* dan *utilization* sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai keamanan pangan.

Penelitian selanjutnya juga dapat memperluas ruang lingkup kajian dengan melakukan perbandingan implementasi AIFS *Framework* di beberapa negara anggota ASEAN atau menelaah efektivitas mekanisme regional seperti AMAF+3, APTERR, dan AFSIS dalam menghadapi krisis pangan kontemporer. Dengan demikian, kajian mengenai keamanan pangan ASEAN tidak hanya memperkaya literatur akademik dalam bidang Hubungan Internasional, tetapi juga mampu menghasilkan rekomendasi yang lebih komprehensif bagi penguatan kebijakan pangan nasional maupun regional di masa mendatang.